

# **MODEL PEMBELAJARAN GENDER DAN POLITIK: UPAYA PENINGKATAN *POLITICAL AWARENESS* SISWI SMU DI SURABAYA**

**Dr. Wulan Retno W., M.Pd**

Staf Pengajar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*e-mail : wulret@yahoo.com*

## **ABSTRACT**

*Young generation is one key factor for a country's developments. Their participation in political process, especially in election process is important. Political participation is one of the key concept which implicitly connected to many political theory of democracy. As many political research already review about young generation's political participation, this research also exploring the same thing in Surabaya female high school students. Using democratic perspective analysis this article trying to explain the level of their responsibility as a citizens.*

**Keywords:** *Political Awareness, Gender, Election, Political Process.*

## **ABSTRAK**

Pemuda adalah kaum yang menentukan kemajuan suatu negara. Partisipasi mereka dalam pemilu ataupun politik secara keseluruhan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Partisipasi politik adalah konsep kunci dalam berbagai teori politik mengenai Demokrasi. Partisipasi politik secara implisit terkait dengan konsep kewarganegaraan baik secara normatif maupun teoritis. Berbagai penelitian tentang partisipasi politik kaum muda seringkali dibahas dalam kerangka perspektif Demokrasi dan untuk melihat tingkat tanggung jawab mereka sebagai warga negara

**Kata-Kata Kunci:** Kesadaran Politik, Gender, Pemilu, Proses Politik.

Salah satu isu penting dalam setiap pemilihan umum (pemilu/*election*) di berbagai negara adalah keterlibatan para pemilu pemula (*young voters*). Para pemilih pemula adalah mereka yang pertama kalinya akan berpartisipasi dalam pemilu. Usia para pemilih pemula berkisar antara 17-22 tahun. Status mereka sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, atau pekerja muda.

Jumlah pemilih pemula di Indonesia dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pemula pada Pemilu 2014 mencapai 11 persen dari total 186 juta jiwa pemilih. Jumlah ini meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah pemilih pemula sekitar 27 juta dari 147 juta pemilih (18,4 persen). Sementara pada Pemilu 2009, ada sekitar 36 juta pemilih dari 171 juta pemilih (21 persen). Menurut Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Sonny Harry Harmadi, kelompok ini berpendidikan baik, mengenal teknologi maju, dan memperoleh banyak pengaruh dari televisi (Kompas, 2013).

Pemilih pemula di Indonesia kerap kali mengabaikan hak pilih mereka dan menjadi apatis dengan kondisi politik di negara tersebut. Maka, untuk menghindari kejadian tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar melakukan sosialisasi terkait pemilu pada April 2014. Hanya saja menurut salah satu peneliti Desintha Dwi Asriani, penelitian dilakukan terhadap 500 siswa SMA di DIY pada Februari 2014 dengan hasil bahwa media massa lebih memerankan peranan penting dibandingkan KPU. Dari penelitian tersebut juga terungkap, 60 persen pemilih pemula itu belum pernah memperoleh sosialisasi pemilu 2014. Selain itu, 65 persen pemilih pemula menyatakan tidak mengetahui jumlah parpol peserta pemilu (Okezone, 2013).

## Model Pembelajaran Gender dan Politik

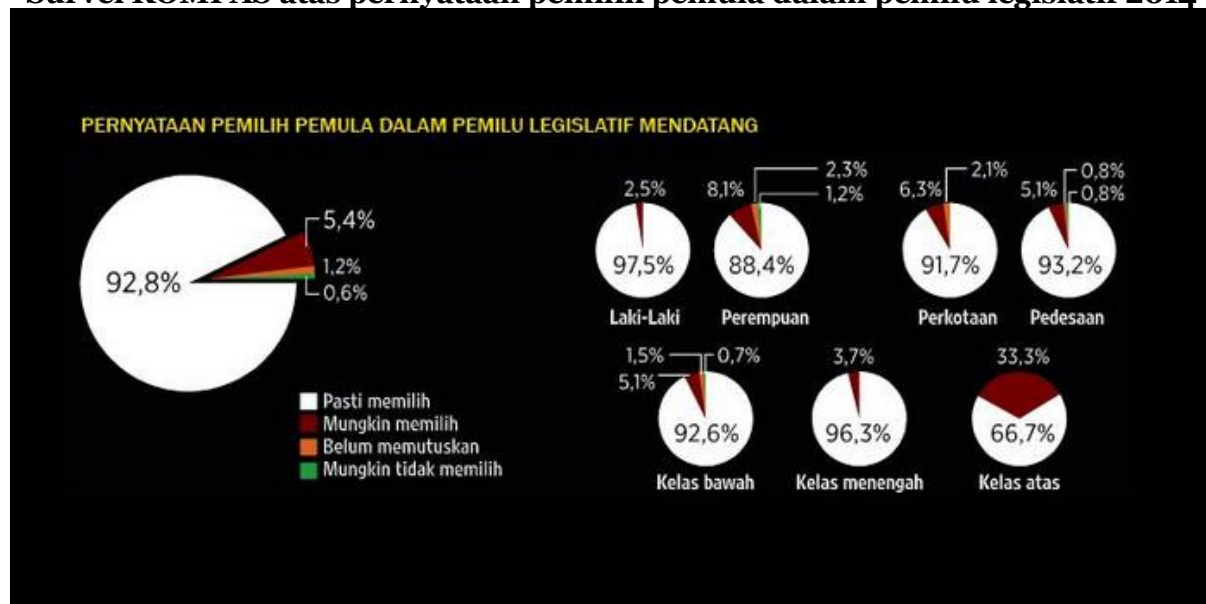
Para pemilih pemula pada Pemilu 2014 merupakan mereka yang masih dalam usia anak-anak ketika pergerakan Reformasi terjadi pada tahun 1998. Mereka tumbuh dalam Indonesia yang berbeda dengan Indonesia sebelum Reformasi 1998, yang merupakan peristiwa tonggak perubahan di Indonesia. Perjuangan menuju Demokrasi belum dirasakan para pemilih pemula ini dan ini yang dapat menjadi faktor utama ketidakpedulian mereka. Fokus para generasi muda ini sudah bukan lagi Demokrasi tetapi pertumbuhan ekonomi. Kaum pemilih pemula ini merupakan swing voters yang belum memiliki pandangan politik yang kuat dan masih bergerak berdasarkan isu-isu yang mengemuka di media (Jakarta Post, 2014).

Kompas melakukan survei kepada para pemilih pemula mengenai partisipasi mereka dalam Pemilu 2014. Berdasarkan hasil survei tersebut, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, kelompok pemilih pemula laki-laki sangat antusias memberikan suara (97 persen) dibandingkan perempuan (88 persen).

Seperti yang dapat dilihat (Diagram 1.1), berdasarkan survei Kompas tersebut, antusiasme pemilih pemula perempuan masih lebih rendah dibandingkan pemilih pemula pria. Di sisi lain, berbagai negara di belahan dunia terus berusaha meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Berdasarkan hasil penelitian Philippa Collin dalam "Young People: Imagining a New Democracy", yang difokuskan pada aktivitas politik generasi muda di Australia, justru para generasi muda perempuan-lah yang lebih aktif dan memahami isu-isu politik yang mengemuka di tingkat pemerintahan mereka (Collin, 2008).

Diagram 1.1:

"Survei KOMPAS atas pernyataan pemilih pemula dalam pemilu legislatif 2014"



Sumber : Litbang Kompas

Dalam beberapa negara, perjalanan perempuan untuk mendapatkan hak suara sangat panjang. Perempuan memiliki populasi lebih dari separuh populasi dunia, tetapi wanita masih kurang terwakili dalam politik dan parlemen. Berdasarkan *2012 Women's Political Participation Report Asia-Pacific*, jumlah perwakilan wanita di empat kawasan masih di bawah rata-rata global. Kaum aktivis perempuan di Indonesia terus memperjuangkan adanya kesetaraan gender yang kemudian menghasilkan UU No. 12 /2003 yang menetapkan jumlah kuota bagi perwakilan perempuan.

Pendidikan politik merupakan hal yang penting dikarenakan untuk membangun sebuah negara yang kuat dengan warga negara yang sadar politik, sosialisasi politik tidaklah cukup bila dilakukan hanya ketika beberapa bulan menjelang pemilu. Lebih-lebih bila kita memperhatikan berbagai sosialisasi politik yang dilakukan menjelang pemilu, baik oleh KPU maupun berbagai *non-governmental organization* (NGO) yang peduli pendidikan politik, lebih difokuskan pada universitas-universitas. Ini artinya sasaran mereka adalah para mahasiswa. Dengan memperhatikan prasyarat usia untuk memilih di Indonesia yaitu 17 tahun, sosialisasi politik semacam *Rock The Vote Indonesia*, tidak lah mampu meng-cover sebuah pendidikan politik secara terutama di tingkat sekolah.

Dengan jumlah pemilih pemula yang besar dalam pemilu 2014 dan yang akan terus berkembang pada pemilu –pemilu kedepannya, pendidikan politik merupakan hal yang perlu dilakukan kepada kaum muda perempuan Indonesia. Inilah mengapa perlu mengangkat isu pendidikan gender dan *political awareness* pada kaum muda perempuan Indonesia, khususnya siswa SMA di Surabaya. Selain itu, juga diperlukan sebuah model pembelajaran politik dan gender bagi kaum muda perempuan di Indonesia. Dengan adanya berbagai sosialisasi politik yang hanya menysasar kepada para mahasiswa dan kurangnya pendidikan politik bagi siswa SMA, artikel ini berharap dapat memberikan sumbangan berupa model pembelajaran politik dan gender berdasarkan studi kasus siswi-siswi SMA di Surabaya. Fokus dalam artikel ini adalah:(1) mengulas tingkat *political awareness* kaum siswi SMA; (2) menemukan faktor-faktor penyebab ketidakpedulian kaum siswi SMA terhadap kondisi politik Indonesia; (3) menemukan model pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan *political awareness* di kalangan siswi SMA, utamanya terkait dengan isu gender dan politik. Seperti yang dinyatakan oleh Collin (2008) berikut ini :

*“young people should be recognised for how and what they contribute in a changing social environment characterised by risk and individualisation...”*  
(Collin, 2008)

Partisipasi politik adalah konsep kunci dalam berbagai teori politik mengenai Demokrasi. Partisipasi politik secara implisit terkait dengan konsep kewarganegaraan baik secara normatif maupun teoritis. Berbagai penelitian tentang partisipasi politik kaum muda seringkali dibahas dalam kerangka perspektif Demokrasi dan untuk melihat tingkat tanggung jawab mereka sebagai warga negara (Collin, 2008).

Berbagai studi yang membahas mengenai partisipasi politik generasi muda seringkali dikaitkan dengan studi/perspektif *sociology of youth*. Berdasarkan perspektif tersebut yang terjadi bukanlah adanya ketidakmampuan generasi muda untuk berpartisipasi aktif, melainkan mereka seringkali tidak dianggap (*excluded*) dalam berbagai proses sosial (White & Wyn, 2004 dalam Collin, 2008)). Generasi muda harus diakui keberadaannya dan perannya yang besar dalam berbagai perubahan sosial (Harris, 2006 dalam Collin, 2008).

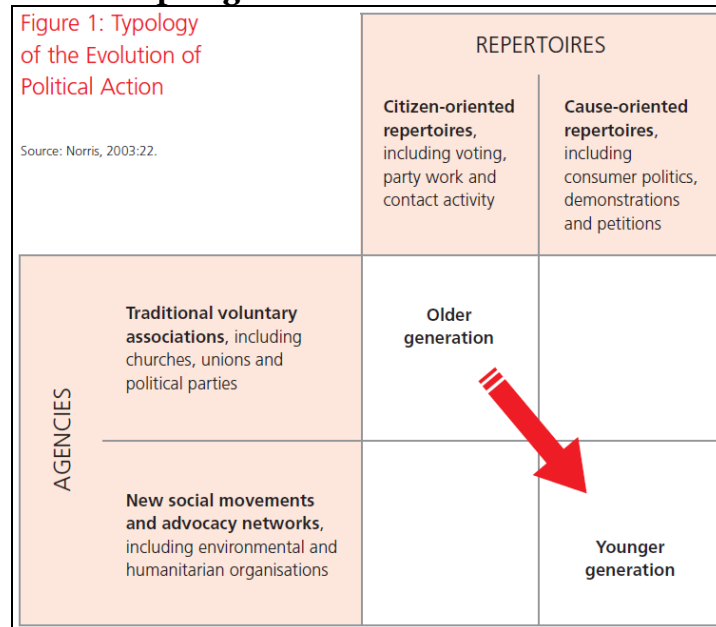
Partisipasi generasi muda dalam demokrasi pada umumnya dapat dikonseptualisasikan kedalam dua cara. Pertama, aktivitasnya sebagai individu dan kedua secara kolektif dalam mempengaruhi *public opinion* dan *political outcome*. Partisipasi generasi muda ini dapat dilihat baik dalam kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah maupun *non-governmental organization* (NGO) yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan public (Collin, 2008).

Berdasarkan sebuah studi komparatif, rendahnya partisipasi generasi muda dalam berbagai kegiatan politik tradisional tidak berarti mereka bersikap apatis maupun tidak peduli. Yang terjadi kemudian adalah sebuah bentuk perubahan bentuk partisipasi politik dengan adanya perbedaan generasi (*generational change*). Norris (2013) berargumen bahwa telah terjadi sebuah *generational shift* dari yang dulunya disebut dengan “*politics of loyalties*” tradisional menjadi sebuah gerakan “*politics of choice*”. Agenda /gerakan “*politics of choice*” inilah yang kemudian saat ini umum ditemukan di generasi muda (Collin, 2008).

## **Model Pembelajaran Gender dan Politik**

Poin penting yang disampaikan Norris adalah bahwa para warga negara saat ini bergerak / termobilisasi secara politik demi isu (*causes*) dan bukan sekedar demi negara. Tetapi kemudian yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peranan kaum muda terkait dengan Demokrasi? Untuk memahami hal tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana generasi muda memandang mengenai “politik”. Setelah memahami bagaimana mereka melihat “politik”, barulah dapat dipahami sedalam apa level partisipasi politik mereka dan bagaimana mempromosikan partisipasi politik di kalangan muda (Collin, 2008). Norris kemudian menggambarkan tipologi ini kedalam bagan teoritis:

**Bagan 1.1:**  
**“Tipologi Evolusi Political Action”**



Sumber: Collin, 2008

### **PARTISIPASI POLITIK : ERA MEDIA DIGITAL DAN INTERNET**

Salah satu jalan dalam memahami dan mengukur partisipasi generasi muda dalam politik dan demokrasi adalah berkat adanya internet dan *Information Communication Technology*(ICT). Internet dan ICT memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas sosial dan politik masyarakat di berbagai negara dan berdasarkan berbagai hasil studi, internet dan ICT berdampak besar bagi perkembangan demokrasi (Collin, 2008).

Studi mengenai internet dan partisipasi politik generasi muda dapat dirangkum kedalam dua pendekatan besar utama. Pendekatan yang pertama fokus kepada posisi normatif sebuah partisipasi politik. Pendekatan ini melihat bagaimana teknologi dapat memperdalam dan mengembangkan demokrasi sebagai mekanisme legal dan bagaimana teknologi dapat memperkuat legitimasi ide-ide politik normatif (Montgomery, 2004 dalam Collin, 2008). Adanya “*e-democracy*” kemudian diukur efektifitasnya dan bagaimana ia dapat menciptakan peluang untuk menghubungkan antara masyarakat dengan para pembuat kebijakan ataupun elit-elit politik. Bahwa teknologi memperdekat jarak antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang seringkali ter-marginisasi atau susah untuk dijangkau (Collin, 2008). Internet kemudian dipandang sebagai kendaraan untuk informasi publik dan pendidikan sipil sehingga internet dianggap mampu membangkitkan “*active citizenship*” melalui mekanisme-mekanisme seperti *online volunteering* di kalangan generasi muda (Collin, 2008).

Pandangan yang kedua mengkritisi adanya sebuah partisipasi politik yang dikonseptualisasikan dan bahwa terdapat *range* yang luas bagi sebuah kegiatan untuk dilihat sebagai bentuk partisipasi politik. Sebagai contohnya, berdasarkan sebuah survei di Inggris dan Australia, terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan generasi muda terkait dengan politik yang berwujud mengunjungi situs-situs politik, membuat situs-situs politik, yang meudian ini semua berujung pada sebuah interaksi generasi muda dalam mengekspekasikan identitas politik mereka. Selain itu internet kemudian menjadi media bagi generasi muda untuk mengetahui berbagai isu penting yang muncul di negara mereka (Collin, 2008).

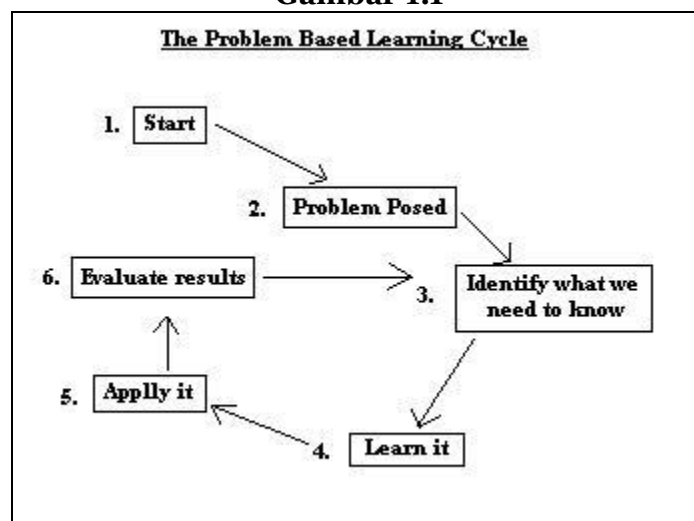
### **PROBLEM BASED LEARNING**

*Problem Based Learning* (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Aspek penting dalam PBL adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan permasalahan dan permasalahan tersebut akan menentukan arah pembelajaran dalam kelompok (Sudarman).

Model pembelajaran *Problem Based Learning* (pembelajaran berbasis masalah), awalnya dirancang untuk program *graduate* bidang kesehatan oleh Barrows, Howard (1986) yang kemudian diadaptasi dalam bidang pendidikan oleh Gallagher (1995). *Problem based learning* dirancang dalam bentuk pembelajaran yang diawali dengan sebuah masalah dengan menggunakan instruktur sebagai pelatihan metakognitif dan diakhiri dengan penyajian dan analisis kerja siswa.

Berikut ini adalah siklus PBL:

**Gambar 1.1**



Sumber: Jayne Klenner-Moore (2003)

Alur dalam PBL, meliputi: (1) identifikasi masalah, (2) pengumpulan bahan, (3) penyusunan hipotesis, (4) uji hipotesis, (5) pemaparan hasil (solusi masalah), (6) evaluasi dan perbaikan, (7) penyusunan teori,(8) ujicoba penerapan teori & perbaikan.

Model pembelajaran berbasis masalah memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan model pembelajaran yang lainnya yaitu 1) Pembelajaran bersifat *student centered*, 2) Pembelajaran terjadi pada kelompok-kelompok kecil, 3) Dosen atau guru berperan sebagai fasilitator dan moderator, 4) Masalah menjadi fokus dan merupakan sarana untuk mengembangkan ketrampilan *problem solving*, 5) Informasi-informasi baru diperoleh dari belajar mandiri (*self directed learning*) (Ni Made Suci, 2008).

## **Model Pembelajaran Gender dan Politik**

Brooks & Martin (1993) secara lebih rinci menguraikan beberapa ciri penting dari PBL, sebagai berikut: (1) tujuan pembelajaran dirancang untuk mengembangkan keahlian pembelajar dalam mengidentifikasi masalah, (2) adanya keberlanjutan masalah, dengan syarat masalah harus memunculkan konsep dan prinsip yang relevan dengan materi perkuliahan yang dibahas dan masalah harus bersifat riil, (3) adanya presentasi masalah sehingga pembelajar merasa memiliki masalah tersebut, (4) pengajar berperan sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan kreativitas berpikir mahasiswa dalam pemecahan masalah (Ni Made Suci, 2008). Adapun dimensi, indikator dan skala pengukuran masing-masing variable disajikan pada tabel. 1.1. di bawah ini :

**Tabel 1.1:**  
**“Definisi Operasional dan Instrumen Pengukuran Variabel Penelitian”**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pengukuran</b>
1.	Pembelajaran Model <i>Problem Based Learning</i>	a. Mengidentifikasi Masalah (Diskusi Kelompok)	a) Tim peneliti akan mengunjungi berbagai SMA di Surabaya b) Tim peneliti meminta pihak sekolah untuk mengumpulkan siswa perempuan yang menjadi subyek penelitian. Para siswi ini kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. c) Lalu mendiskusikan dengan kelompok kecil tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam format identifikasi masalah serta alasan memilih masalah tersebut.	Skala Semantik Differensial Model Guttman dengan alternative jawaban dari yang paling positif sampai pada yang paling negatif dengan skala 5-4-3-2-1
		b. Memilih masalah sebagai bahan kajian	a) Membuat daftar masalah yakni setiap kelompok kecil yang telah selesai mengidentifikasi masalah dengan dukungan informasi yang telah memadai  b) Menetapkan satu masalah dan menuliskannya dalam daftar masalah di papantulis diikuti oleh kelompok kecil lainnya sehingga terdapat sejumlah masalah	
		c. Mencari solusi permasalahan	a) Setiap kelompok kecil mendiskusikan solusi untuk memecahkan berbagai masalah di papantulis.  b) Solusi-solusi dari setiap kelompok kecil tersebut	

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
			kemudian dikumpulkan lagi untuk disharingkan di kelompok besar.  c) Hasil akhir berupa beberapa solusi dari berbagai permasalahan-permasalahan.	
2.	<i>Political Awareness Level</i>	Mengukur tingkat kesadaran politik parasiswa.	a) Memiliki pengetahuan tentang dunia politik. b) Mengajak para siswa berdiskusi mengenai instrumen-instrumen yang dianggap efektif guna meningkatkan kesadaran politik parasiswa.	

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa perempuan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Surabaya. Jumlah SMA dan SMK negeri dan swasta di Surabaya mencapai 266 buah. Pemilihan sekolah sebagai sampel penelitian akan mempertimbangkan faktor keberagaman lokasi serta keberagaman latar belakang sekolah dan siswa-siswanya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian digunakan kuesioner, interview, observasi, dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Ada dua tahapan pokok dalam penelitian; (1) Tahap pengembangan model pembelajaran dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui *Problem Based Learning* dan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui berbagai masalah terkait dengan rendahnya *political awareness* kaum muda, khususnya siswi-siswi SMA di daerah Surabaya, (2) Tahap pengujian model dilakukan untuk menguji efektifitas desain model akhir yang dikembangkan dengan *quasi-experiment method*.

## HASIL ANALISIS

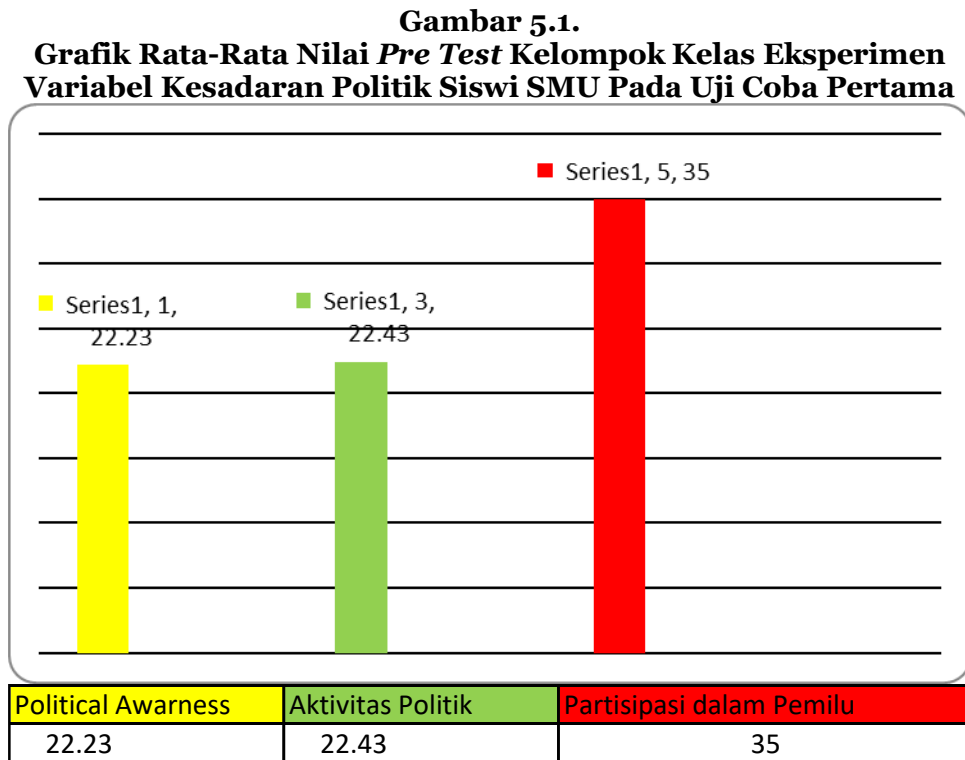
Secara umum, kondisi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Surabaya pada umumnya menunjukkan metode pembelajaran yang dipergunakan oleh para guru dengan metode ceramah/lektorial, tanya jawab, dan diskusi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat dideskripsikan bahwa metode pembelajaran konvensional yang digunakan pada umumnya telah melibatkan partisipasi aktif siswa di kelas, sehingga guru tidak menjelaskan terlalu banyak. Namun proses pembelajaran masih berbasis pada materi di diktat atau buku paket yang digunakan di sekolah tersebut. Dengan demikian para guru belum memaksimalkan variasi media pembelajaran sebagai komponen utama model pembelajaran. Keberhasilan proses pembelajaran juga sebagian besar masih didasarkan pada perolehan beragam nilai.

Hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan bahwa belum maksimalnya upaya guru untuk mendapatkan umpan balik dan relevansi dari proses pembelajaran yang disajikan. Siswa/siswi SMU diberi materi pokok pembelajaran, sehingga dinamika pembelajaran politik belum dinalisa secara maksimal. Berbeda dengan pembelajaran konvensional tersebut, *Problem Based Learning* model lebih banyak menggunakan kasus sebagai basis pembelajaran dengan ditopang beragam media pembelajaran. Sesuai dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut ini akan disajikan

### Model Pembelajaran Gender dan Politik

hasil pengumpulan data dari masing-masing instrumen tersebut baik pada hasil uji coba yang pertama maupun uji coba yang kedua.

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil *pre-test* dan *post-test* siswi SMU yang mengikuti pembahasan materi politik, gender, dan partisipasi pemilu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelompok kelas eksperimen, menunjukkan bahwa rata-rata nilai *pre test* pada kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik adalah sebesar [a] 22,23 atau 63,51 % dari nilai total dimensi *political awareness*, [b] 22.43 atau 56,07% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 35 atau 70% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.1 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *pre test* pada kelompok kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik pada siswi SMU pada uji coba pertama.

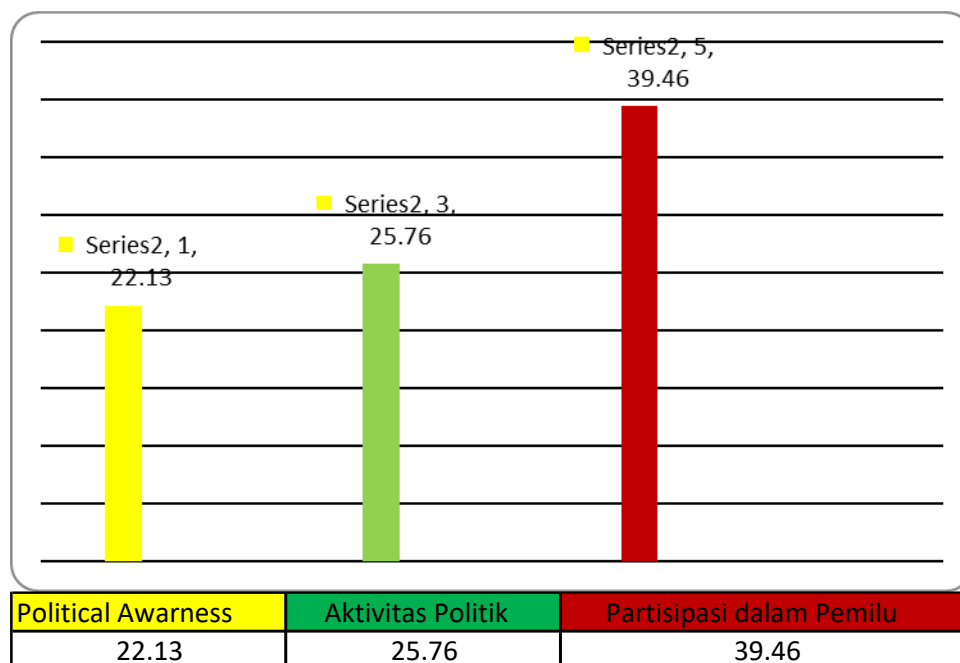


Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015.

Berdasarkan hasil *post-test* pada kelas eksperimen dapat diketahui bahwa rata-rata nilai *post test* pada kelas eksperimen masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 22,13 atau 63,23% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 25,76 atau 64.40% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 39,46 atau 78,92% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.2 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *post test* kelompok kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba pertama.

**Gambar 5.2.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Post Test* Kelompok Kelas Eksperimen Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Pertama**



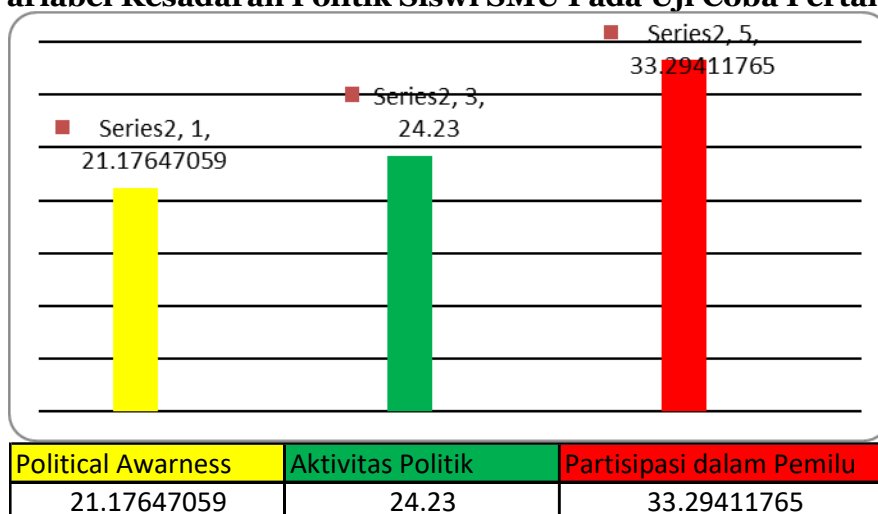


Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

**Kelas Kontrol**

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil *pre test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 21,17 atau 60,50% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 24,23 atau 60,58% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 33,29 atau 66,59% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.3 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *pre test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba pertama.

**Gambar 5.3.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Pre Test* Kelompok Kelas Kontrol**  
**Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Pertama**



Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

Berdasarkan hasil *post-test* pada kelompok kelas kontrol dapat diketahui bahwa rata-rata nilai *post test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 21,7 atau 62,00% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 25,29 atau 62,22% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 34,11 atau

68,22% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.4 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *post test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba pertama

**Gambar 5.4.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Post Test* Kelompok Kelas Kontrol**  
**Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Pertama**



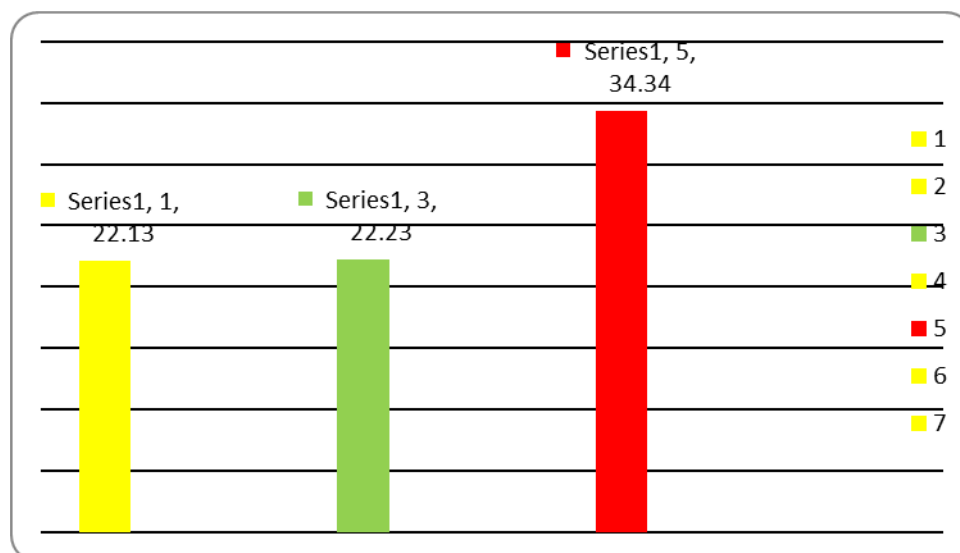
Political Awarness	Aktivitas Politik	Partisipasi dalam Pemi
21.7	25.29	34.11

Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

**Kelas Eksperimen**

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner pada uji coba yang kedua, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil *pre-test* dan *post-test* siswi SMU yang mengikuti pembahasan materi politik, gender, dan partisipasi pemilu pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada kelompok kelas eksperimen, menunjukkan bahwa rata-rata nilai *pre test* pada kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik adalah sebesar [a] 22,13 atau 63,23 % dari nilai total dimensi *political awarness*, [b] 22.23 atau 56,58% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 34,34 atau 68,68% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.5 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *pre test* pada kelompok kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran kesadaran politik pada siswi SMU pada uji coba kedua.

**Gambar 5.5.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Pre Test* Kelompok Kelas Eksperimen**  
**Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Kedua**

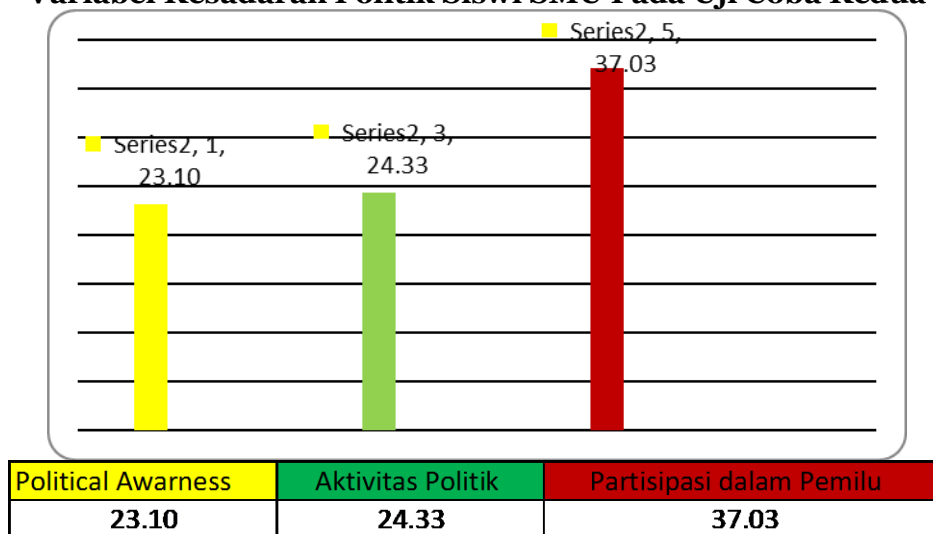


Political Awarness	Aktivitas Politik	Partisipasi dalam Pemilu
22.13	22.23	34.34

Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015.

Berdasarkan hasil *post-test* pada kelas eksperimen di uji coba yang kedua dapat diketahui bahwa rata-rata nilai *post test* pada kelas eksperimen masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 23,10 atau 66,00% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 24,33 atau 60,83% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 37,03 atau 74,07% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.6 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *post test* kelompok kelas eksperimen untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba kedua.

**Gambar 5.6.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Post Test* Kelompok Kelas Eksperimen Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Kedua**



Political Awarness	Aktivitas Politik	Partisipasi dalam Pemilu
23.10	24.33	37.03

Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

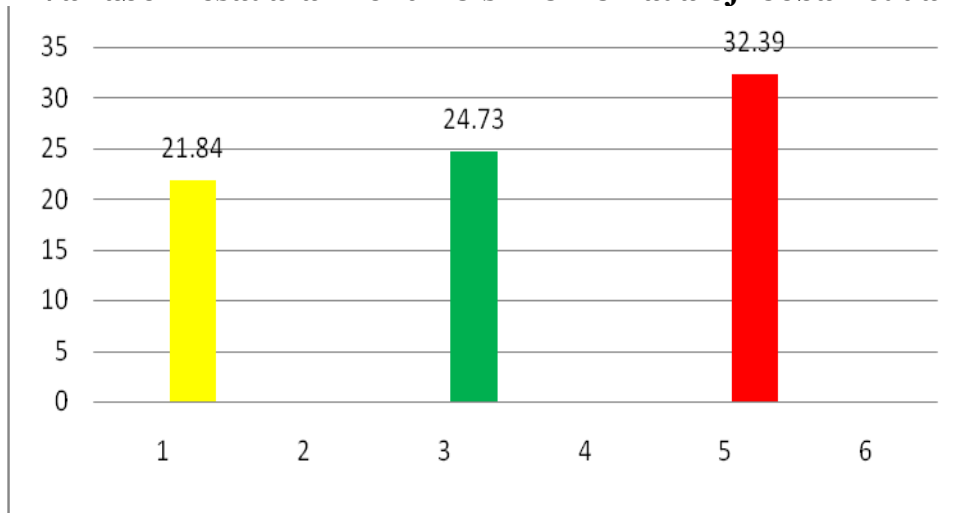
### Kelas Kontrol

Berdasarkan hasil jawaban responden melalui kuesioner pada uji coba yang kedua, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai hasil *pre test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 21,84 atau 62,40% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 24,73 atau 61,83% dari nilai total dimensi

## Model Pembelajaran Gender dan Politik

aktivitas politik, [c] 32,39 atau 64,78% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.7 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *pre test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba kedua.

**Gambar 5.7.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Pre Test* Kelompok Kelas Kontrol Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Kedua**

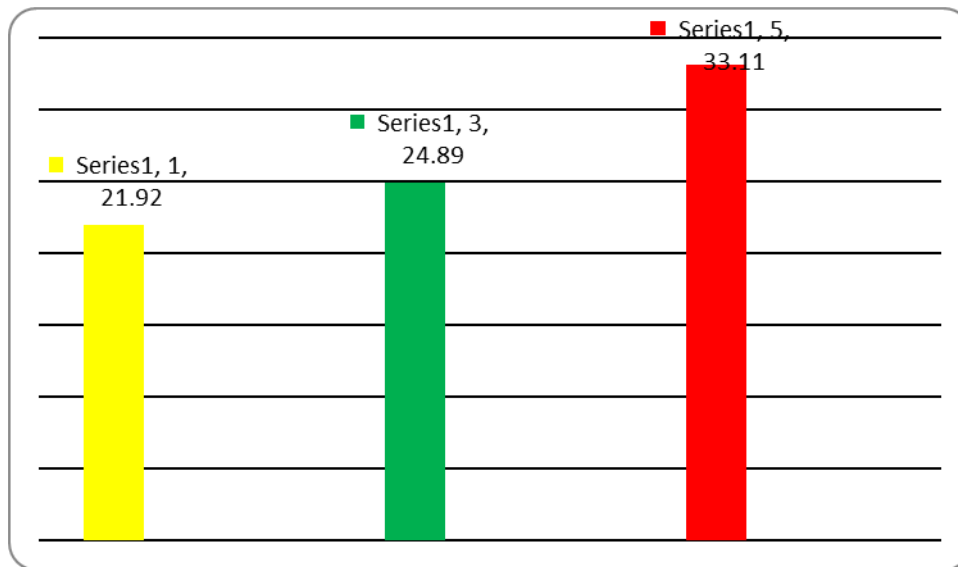


Political Awarness	Aktivitas Politik	Partisipasi dalam Pemilu
21.84	24.73	32.39

Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

Berdasarkan hasil *post-test* pada kelompok kelas kontrol pada uji coba yang kedua dapat diketahui bahwa rata-rata nilai *post test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel Kesadaran Politik adalah sebesar [a] 21,92 atau 62,63% dari nilai total untuk dimensi *political awareness*, [b] 24,89 atau 62,23% dari nilai total dimensi aktivitas politik, [c] 33,11 atau 66,22% dari nilai total dimensi partisipasi dalam pemilu. Gambar 5.8 berikut ini akan menunjukkan rata-rata nilai *post test* pada kelompok kelas kontrol untuk masing-masing dimensi variabel kesadaran politik siswi SMU pada uji coba kedua.

**Gambar 5.8.**  
**Grafik Rata-Rata Nilai *Post Test* Kelompok Kelas Kontrol Variabel Kesadaran Politik Siswi SMU Pada Uji Coba Kedua**



Political Awarness	Aktivitas Politik	Partisipasi dalam Pem
21.92	24.89	33.11

Sumber: Hasil Analisis, data primer diolah, 2015

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui dua cara, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan mengikuti kaidah analisis data kualitatif yang dilakukan pada model penelitian tindakan kelas. Kolaborasi antara dosen selaku praktisi dan siswa serta pakar pendidikan terus dilakukan secara intensif selama proses pengembangan model pembelajaran ini. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji t baik untuk sampel independen (*independent sample*) dan sampel berpasangan (*paired sample*).

Pada tahap pengembangan model sudah ditemukan model yang sudah valid, namun demikian perlu dilakukan uji coba model untuk mengetahui efektifitas dari model pembelajaran gender dan politik dalam upaya meningkatkan *political awarness* siswi SMU di Surabaya yang telah dikembangkan melalui uji eksperimen dengan model kuasi eksperimen. Data hasil kuasi eksperimen selanjutnya diolah dengan analisis statistik model uji t dengan pertimbangan bahwa dalam uji coba model ini peneliti ingin membandingkan rata-rata nilai pada kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol dan membandingkan antara keadaan sebelum dengan sesudah diberikan tindakan.

Pada setiap uji coba model diperlukan 5 (lima) kali analisis yang dilakukan, yaitu: **pertama**, melakukan analisis data *pre test* antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan awal subyek yang mau diteliti. Pada tahap ini, kondisi subjek penelitian secara statistik diharapkan sama antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. **Kedua**, analisis dilakukan dengan membandingkan hasil *post test* kelompok kelas eksperimen dengan hasil *post test* kelompok kelas kontrol. Pada tahap ini secara statistik diharapkan hasil kelompok kelas eksperimen lebih tinggi dibanding dengan kelompok kelas kontrol. **Ketiga**, analisis dilakukan dengan membandingkan skor *post test* dengan *pre test* kelompok kelas eksperimen. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan yang ditimbulkan oleh perlakuan yang diberikan pada subjek yang dianalisis. **Keempat**, analisis dilakukan dengan membandingkan skor *post test* dengan *pre test* kelompok kelas kontrol. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan yang ditimbulkan oleh perlakuan yang diberikan pada subjek yang dianalisis. **Kelima**, analisis dilakukan dengan membandingkan rata-rata *gained score* antara kelompok kelas eksperimen dengan kelompok kelas kontrol. Tujuannya adalah untuk melihat perbedaan yang ditimbulkan oleh perlakuan yang berbeda yang diberikan pada masing-masing

## **Model Pembelajaran Gender dan Politik**

kelompok kelas atau subjek yang dianalisis.

Berdasarkan analisis perbedaan *gained score* kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan yang ditunjukkan dengan nilai F sebesar 8,741 dengan level signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,009. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari rata-rata nilai *gained score* kelompok kelas eksperimen dan kelompok kelas kontrol. Berdasarkan analisis hasil uji coba model yang kedua ini, maka didapat hasil bahwa model pembelajaran gender dan politik berbasis *problem based learning model* ini memberikan dampak positif terhadap *political awareness* siswi SMU di Surabaya.

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian mengenai kesadaran politik di atas didapat kesimpulan bahwa metode pembelajaran politik dengan pendekatan *Problem Based Learning* (PBL) amat diperlukan bagi siswi sekolah menengah atas untuk meningkatkan kesadaran politik. Hal ini ditunjukkan dari hasil survey dan wawancara yang dilakukan baik dengan siswa maupun pengajar SMU di Surabaya. *Problem Based Learning* (PBL) atau pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pelajaran. Aspek penting dalam PBL adalah bahwa pembelajaran dimulai dengan permasalahan dan permasalahan tersebut akan menentukan arah pembelajaran dalam kelompok. Dengan metode pembelajaran tersebut diharapkan tingkat kesadaran politik dapat dipupuk dari usia remaja. Hal ini juga bermanfaat bagi peningkatan partisipasi politik perempuan dalam Pemilu.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa [1] terdapat perbedaan signifikan antara kelompok kelas eksperimen yang mendapat perlakuan berupa proses pembelajaran dengan model pembelajaran gender dan politik berbasis *problem based learning model* dengan kelompok kelas kontrol yang menggunakan model konvensional dalam proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan pada pokok pembahasan materi permasalahan politik, gender, dan partisipasi pemilu; dan [2] implementasi model pembelajaran gender dan politik berbasis *problem based learning model* memberikan dampak positif terhadap peningkatan aspek-aspek atau dimensi-dimensi *political awareness* siswi SMU di Surabaya. Hasil penelitian ini mengindikasikan dan memberikan bukti bahwa model pembelajaran gender dan politik berbasis *problem based learning model* mampu mengembangkan seluruh ranah kecerdasan (*multiple intelligence*) siswi baik ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik yang terkait dengan dimensi-dimensi *political awareness* siswi SMU.

Hasil penelitian ini juga memberikan bukti baru bahwa salah satu cara untuk meningkatkan *political awareness* dikalangan generasi muda khususnya dikalangan siswi-siswi SMU dapat dilakukan dengan model pembelajaran gender dan politik berbasis *problem based learning model* karena terbukti mampu member dampak positif terhadap peningkatan aspek-aspek atau dimensi-dimensi *political awareness* siswi-siswi SMU utamanya di Surabaya. Temuan ini juga memberikan cara baru dalam pendidikan politik di kalangan generasi muda guna membangun sebuah negara yang kuat melalui kesadaran politik termasuk partisipasi politik warga negaranya utamanya dikalangan generasi muda. Dengan meningkatnya kesadaran politik dikalangan generasi muda ini akan mempengaruhi dan menentukan kemajuan kehidupan dan peradaban demokrasi suatu negara. Partisipasi generasi muda dalam pemilu ataupun politik secara keseluruhan merupakan hal yang tidak bisa dianggap remeh. Partisipasi politik adalah konsep kunci dalam berbagai teori politik mengenai Demokrasi. Partisipasi politik secara implisit terkait dengan konsep kewarganegaraan baik secara normatif maupun teoritis. Partisipasi generasi muda dalam

demokrasi pada umumnya dapat dikonseptualisasikan kedalam dua cara. Pertama, aktivitasnya sebagai individu dan kedua secara kolektif dalam mempengaruhi *public opinion* dan *political outcome*. Partisipasi generasi muda ini dapat dilihat baik dalam kegiatan yang difasilitasi oleh pemerintah maupun *non-governmental organization* (NGO) yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan public (Collin, 2008).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur

- Andriana, N., Siregar, S. N., Haris, S., Yanuarti, S., Budiatri, A. P., & Amalia, L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Budiardjo, Miriam. (1996). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Collin, Phillipa. "Young People Imagining a New Democracy: Literature Review." *The Foundation for Young Australians*, 2008.
- Core Plan. *The Kenny Report II: Is "Politics" for young people?* Core Plan Report, UK: Core Plan, 2014.
- Gaffar, Affan. (2002). *Politik Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- JASS-Southeast Asia. *Raising Women's Political Awareness: Nias Island, North Sumatra, Indonesia*. Workshop Report, Indonesia: JASS-Southeast Asia, 2009.
- Khofifah Indar Parawansa. "Enhancing Women's Political Participation in Indonesia: Case Study Indonesia". *Women in Parliament: Beyond Numbers*.
- Krook, M. L. (2009). *Quota for Women in Politics: Gender and Candidate Selection Reform Worldwide*. Oxford: Oxford University Press.
- Megawangi, 1997. *Gender Perspective in Early Childhood Care and Development in Indonesia*. Report Submitted to The Consultative Group on Early Childhood Care and Development, M A, USA.
- Ni Made Suci. (2008). "PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI BELAJAR DAN HASIL BELAJAR TEORI AKUNTANSI MAHASISWA JURUSAN EKONOMI UNDIKSHA". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Undiksha*, April 2008 2(1), 74-86.
- Surbakti, Ramlan. (1996). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Syafe'i, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- The Electoral Commission. *Gender and Political Participation*. The Electoral Commission Report, UK: The Electoral Commission, 2004.
- UNDP. (2010). *Power, Voice and Rights: A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific*. New Delhi: Macmillan Publishers India Ltd.

### Online

- Asia Foundation. *Will Indonesia's Online Youth Shape 2014 Elections?* Oktober 16, 2013. *Will Indonesia's Online Youth Shape 2014 Elections?* (accessed April 20, 2014).
- Bangkok Post. *Website Helps Educate Young Indonesian Voters About Politics*. April 21, 2014. [www.bangkokpost.com/print/405885/](http://www.bangkokpost.com/print/405885/) (accessed April 22, 2014).
- "Indonesian Electoral Survey 2010". (2010). International Foundation for Electoral Systems (IFES). Australian Indonesian Partnership. [www.ifes.org](http://www.ifes.org).
- Inside Indonesia.org. *Gender and Politics*. Juni 2011. [www.insideindonesia.org/?option=com\\_content&view=article&id](http://www.insideindonesia.org/?option=com_content&view=article&id) (accessed April 20, 2014).
- Jakarta Globe. *Indonesia Young Voters Neglected No More*. Juli 03, 2013. [www.insideindonesia.org/?option=com\\_content&view=article&id](http://www.insideindonesia.org/?option=com_content&view=article&id) (accessed April 20, 2014).
- Jakarta Post. *Educating the Neglected Young Voters*. Februari 24, 2014. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/02/24/educating-neglected-y> (accessed April 20, 2014).

### **Model Pembelajaran Gender dan Politik**

- . *The New Indonesia: 67 Million First-Time Voters in 2014*. Januari 19, 2012. <http://www.thejakartapost.com/news/2012/01/19/the-new-indonesia-67-m> (accessed April 20, 2014).
- Kompas.com. *Antusiasme Pemilih Muda*. April 8, 2014. [nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemil](http://nasional.kompas.com/read/2014/04/08/1946582/Antusiasme.Pemil) (accessed April 20, 2014).
- . *Cari Pemilih Cerdas, "Rock The Vote" Sambangi Kampus Semarang*. Maret 19, 2014. [regional.kompas.com/read/2014/03/19/2048300/Cari.Pemilih.Cerd](http://regional.kompas.com/read/2014/03/19/2048300/Cari.Pemilih.Cerd) (accessed April 20, 2014).
- Kwok, Yenni. *Indonesia's Elections Feature Plenty of Women, but Respect in Short Supply*. April 8, 2014. [time.com/53191/indonesias-election-features-plenty-of-women-but](http://time.com/53191/indonesias-election-features-plenty-of-women-but) (accessed 04 20, 2014).
- Okezone. *Survei UGM: 65% Pemilih Muda Buta Parpol & Pemilu*.Maret 15, 2014. <http://kampus.okezone.com/read/2014/03/12/373/954049/survei-ugm-65> (accessed April 20, 2014).
- Kenawas, Y. C., &Fitriani. (2013). Indonesia's next parliament: celebrities, incumbents and dynastic members? Retrieved Agustus 2013, 15, from East Asia Forum: <http://www.eastasiaforum.org>
- Safitri, D. (2011, Maret 7).Perempuan di Parlemen: SudahkahMembawaPerubahan? Retrieved Agustus 15, 2013, from BBC Indonesia: [http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/2011/03/110304\\_perem](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/03/110304_perem)
- UU RI No.8 /2012.(n.d.). Retrieved Agustus 2013, 15, from <http://datahukum.pnri.go.id/>
- UN Women, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. (n.d.).Democratic Governance. Retrieved Agustus 15, 2013, from UN Women, UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women: [http://www.unifem.org/gender\\_issues/democratic\\_governance/](http://www.unifem.org/gender_issues/democratic_governance/)